

**EVALUASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**RAVITA WIDIYA ASTUTIK
NIM. 07011181621021**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-I Ilmu
Administrasi Publik

Oleh :

RAVITA WIDIYA ASTUTIK
07011181621021

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2021

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil M.Si
NIP. 196712011992032002



Pembimbing II

Drs. Mardianto M.Si
NIP. 196211251989121001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kota Palembang*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 05 April 2021

Indralaya, 05 April 2021

Ketua

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Anggota

2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

3. Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002

4. Dr. Alamsyah, S.Ip., M.Si
NIP. 19780818200912003

Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi. Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial. Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga adalah kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Dalam lingkup keluarga, kepedulian sosial dapat terlihat dari adanya kepedulian dan perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut.

Kebijakan pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Pasal 47 huruf (c) bahwa peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.

Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki sekitar 63,31 juta penduduk lanjut usia (lansia) atau hampir mencapai 20 persen populasi. Bahkan, proyeksi PBB juga menyebutkan bahwa persentase lansia Indonesia akan mencapai 25 persen pada tahun 2050 atau sekitar 74 juta lansia, mulai tahun 2021 struktur penduduk Indonesia diprediksi memasuki populasi menua. Sejak tahun 2017, porsi penduduk lansia Indonesia terhadap total populasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak balita. Peningkatan jumlah lansia akan menjadi tantangan tersendiri ketika

persiapan pra-lansia untuk menyambut masa senja tidak terlalu baik yang mengakibatkan lansia di masa mendatang jauh dari kata sehat, aktif, dan produktif.

Meningkatnya jumlah lansia ini beriringan dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Persentase rumah tangga lansia tahun 2019 sebesar 27,88 persen, dimana 61,75 persen diantaranya dikepalai oleh lansia, yang menarik dari keberadaan lansia Indonesia adalah ketersediaan dukungan potensial baik ekonomi maupun sosial yang idealnya disediakan oleh keluarga. Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa 9,38 persen lansia tinggal sendiri, dimana persentase lansia perempuan yang tinggal sendiri hampir tiga kali lipat dari lansia laki-laki (13,39 persen berbanding 4,98 persen). Dibutuhkan perhatian yang cukup tinggi dari seluruh elemen masyarakat terkait hal ini, karena lansia yang tinggal sendiri membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar mereka mengingat hidup mereka lebih berisiko, terlebih pada lansia perempuan yang cenderung termarginalkan.

Kota Palembang sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah lansia yang cukup tinggi dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berikut data jumlah lansia di Kota Palembang dari tahun 2015 sampai 2019:

Tabel 1.1. Jumlah Lansia Kota Palembang Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Lansia	Persentase Dari Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk
1	2015	99.834	6,31%	1.580.517
2	2016	111.023	6,93%	1.602.071
3	2017	120.138	7,37%	1.629.110
4	2018	122.606	7,46%	1.643.488
5	2019	125.794	7,56%	1.662.893

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, Tahun 2020

Berdasarkan data jumlah lansia di Kota Palembang bahwa perkembangan jumlah lansia di Kota Palembang selalu mengalami peningkatan dari 99.834 jiwa tahun 2015 meningkat menjadi 125.794 jiwa pada tahun 2019 dengan persentase dari jumlah total penduduk di Kota Palembang yaitu sebesar 7,56%. Selain itu, dapat digambarkan juga

kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia di Kota Palembang juga belum optimal.

Proporsi Lansia di Kota Palembang setiap tahun meningkat, jumlah penduduk lanjut usia di Kota Palembang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015-2019 terdapat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Lanjut Usia Menurut Jenis Kelamin di Kota Palembang

Jenis Kelamin	Usia Lansia	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Perempuan	60-64	19.076	22.199	23.667	25.228	26.739
	65-69	13.922	15.188	15.906	16.722	17.691
	70-74	9.998	10.467	10.765	11.111	11.504
Laki-laki	60-64	19.317	22.735	24.106	25.431	26.670
	65-69	12.264	13.980	14.950	16.034	17.166
	70-74	7.902	8.331	8.553	8.836	9.245

Sumber : (BPS, 2021) Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2021

Berdasarkan data proporsi lansia diatas pertumbuhan lansia perempuan pada usia 60 tahun sampai 64 tahun terjadi peningkatan yakni dari 19.076 pada tahun 2015 menjadi 26.739 lansia pada tahun 2019, begitupun dengan jumlah lansia laki-laki yang berusia 60 tahun sampai 64 tahun dari 19.317 ada tahun 2015 meningkat menjadi 26.670 lansia di tahun 2019, pada usia 60 tahun sampai 64 tahun didominasi oleh lansia laki-laki, sedangkan lansia di usia 65 tahun sampai dengan 69 tahun jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki yaitu berjumlah 13.922 pada tahun 2015 menjadi 17.691 lansia di tahun 2019, begitupun diusia 70 tahun sampai 74 tahun lansia perempuan mencapai 9.998 di tahun 2015 menjadi 11.504 lansia di tahun 2019, ini menandakan bahwa harapan hidup lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki yang hanya berjumlah 7.902 lansia ditahun 2015 dan 9.245 lansia di tahun 2019.

Upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga yang berwawasan sejahtera, salah satu program pemerintah yang dilaksanakan ke elemen yang paling kecil yaitu keluarga, terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga, Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal, sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 22 huruf (c) pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan salah satu diantaranya pembinaan keluarga lansia (BKL)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu lembaga yang memberikan suatu wadah bagi lanjut usia dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan dengan berintegrasi dengan pos pembinaan terpadu salah satu programnya yaitu Bina Keluarga Lansia (BKL). Pemberdayaan lansia yang dikembangkan oleh BKKBN dilakukan di lingkup masyarakat maupun di lingkup keluarga secara langsung melalui Program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang dengan mengacu pada landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga pada Pasal 7 huruf (c) yang menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, salah satunya melalui program Bina Keluarga Lansia.

Kehadiran Bina Keluarga Lansia ini dapat mengembangkan bakat dari lansia yang mempunyai semangat untuk berprestasi. Bina Keluarga Lansia juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, juga pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraannya bisa

meningkat. Sejumlah kegiatan BKL seperti senam lansia, bidang spiritual yaitu penggajian, kegiatan emosional yaitu permainan-permainan, kegiatan intelektual, lingkungan, vokasi dan sosial kemasyarakatan.

Kebijakan Program Bina Keluarga Lansia di Kota Palembang diawasi langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang yang dilaksanakan di setiap Kelurahan dengan Lurah sebagai penanggung jawab utamanya untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Lansia. Kelompok ini mempunyai tugas dapat mengakses pelayanan informasi tentang keluarga lansia dan lain-lain. Kelompok Bina Keluarga Lansia ini bertanggung jawab pada Lurah di wilayahnya masing-masing. Namun perkembangan sampai sekarang, pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia ini belum dilaksanakan secara keseluruhan di semua Kelurahan yang ada di Kota Palembang serta peran dan fungsi kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) masih belum optimal.

Kota Palembang dalam program Bina Keluarga Lansia (BKL) memiliki 92 kelompok kegiatan (poktan) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Palembang sebagai instansi pelaksana program Bina Keluarga Lansia ini membagi jenis Poktan tersebut ke dalam 3 karakteristik yaitu kelompok kegiatan Bina keluarga lansia (BKL) yang sangat aktif, kelompok kegiatan BKL yang aktif, dan kelompok kegiatan Bina keluarga lansia (BKL) yang tidak aktif. Berikut data jumlah kelompok kegiatan dari ketiga karakteristik tersebut yang ada di Kota Palembang:

Tabel 1.3 Karakteristik Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kota Palembang

No	Jenis kelompok kegiatan	Jumlah kelompok kegiatan	Persentase keaktifan
1	Kelompok kegiatan BKL yang aktif	39	42,39%
2	Kelompok kegiatan BKL yang cukup aktif	30	32,61%
3	Kelompok kegiatan BKL yang tidak aktif	23	25,00%
Total kelompok kegiatan BKL		92	100%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, Tahun 2020

Berdasarkan data karakteristik kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia yang ada di Kota Palembang maka dapat dijelaskan bahwa kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia yang aktif dari jumlah seluruh Poktan yang ada yaitu sebanyak 39 kelompok kegiatan BKL atau 42,39%, kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia yang lumayan aktif sebanyak 30 kelompok kegiatan atau 32,61% dan kelompok kegiatan BKL yang tidak aktif ada 23 kelompok kegiatan atau 25%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih belum optimalnya jumlah kelompok kegiatan BKL yang termasuk aktif di Kota Palembang.

Berdasarkan jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia di Kota Palembang terdiri dari 92 kelompok dipilih tiga kelompok dengan indikator aktif, cukup aktif, dan tidak aktif, dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan setiap masing-masing kelompok kegiatan, untuk melihat perbedaan 3 karakteristik kelompok kegiatan BKL yaitu kelompok kegiatan BKL yang aktif, kelompok kegiatan BKL yang cukup aktif, dan Poktan BKL yang tidak aktif, maka dapat diambil contoh kelompok kegiatan untuk masing-masing karakteristik kelompok kegiatan BKL yang ada di Kota Palembang. Ketiga contoh kelompok kegiatan tersebut yaitu kelompok kegiatan Anggrek (BKL aktif) di Kecamatan Sukarami, kelompok kegiatan Mangga (BKL cukup aktif) di Kecamatan Kemuning dan kelompok kegiatan Nusa Indah (BKL yang tidak aktif) di Kecamatan Alang-Alang Lebar.

Tabel 1.4 Perbedaan Karakteristik kelompok kegiatan BKL di Kota Palembang

Karakteristik	BKL Anggrek Kecamatan Sukarami	BKL Mangga Kecamatan Kemuning	BKL Nusa Indah Kecamatan Alang- alang Lebar
Jumlah Kegiatan	8 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan
Jumlah Pengurus Kelompok	3 Orang	1 Orang	1 Orang
Jumlah Anggota Kelompok	7 Orang	4 Orang	2 Orang
Jumlah Anggota yang terlatih	4 Orang	2 Orang	1 Orang
Frekuensi Pertemuan / Bulan	17 Kali	1 Kali	Tidak Menentu
Jumlah Lansia yang ikut	64 orang	12 orang	8 orang

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, Tahun 2020

Berdasarkan data perbedaan di atas terlihat bahwa kelompok kegiatan Anggrek memiliki karakteristik yang sangat kuat dibandingkan kelompok kegiatan Mangga dan kelompok kegiatan Nusa Indah. Dimana jumlah kegiatan BKL yang dilaksanakan ada 8 kegiatan yaitu pengajian, senam lansia, berenang, posyandu lansia, penyuluhan, berkebun, rekreasi dan keterampilan kerajinan. Sedangkan kelompok kegiatan Mangga 3 kegiatan kelompok kegiatan Nusa Indah hanya memiliki 2 kegiatan yaitu penyuluhan dan pembinaan. Dilihat dari jumlah pengurus dan anggota kelompok, kelompok kegiatan BKL Anggrek juga memiliki perbedaan signifikan yaitu dengan 3 orang pengurus dan 7 anggota kelompok. Anggota kelompok yang ada pada BKL Anggrek juga sudah terlatih sedangkan anggota kelompok BKL Mangga 2 orang dan BKL Nusa Indah 1 orang. Frekuensi pertemuan kelompok kegiatan Anggrek juga intensif yaitu sebanyak 17 kali dalam satu bulan sedangkan kelompok kegiatan BKL Mangga dan kelompok kegiatan BKL Nusa Indah tidak menentu hanya 1 kali dalam satu bulan. Jumlah lansia yang ikut dalam kelompok kegiatan Anggrek lumayan banyak yaitu 64 lansia sedangkan kelompok kegiatan BKL Mangga hanya 12 lansia dan kelompok kegiatan BKL Nusa Indah hanya 8 lansia.

Berdasarkan perbedaan karakteristik BKL tersebut, maka penulis memilih ketiga kelompok kegiatan tersebut sebagai obyek penelitian yang mewakili kelompok kegiatan BKL yang ada di Kota Palembang. Pada pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia, faktor dana dan kaderisasi merupakan penghambat utama dalam menjamin kesinambungan kegiatan BKL, oleh karena itu, kualitas hidup lansia di Kota Palembang cenderung masih belum optimal. Serta kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan terkait Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 pasal 10 menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan Bina Keluarga Lansia, Menteri melakukan koordinasi dengan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas hidup

lansia. Penetapan kerjasama juga dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk penetapan program dalam rangka peningkatan kualitas keluarga lansia.

Kondisi ini perlu diperhatikan agar keluarga yang kurang berketahanan dapat diberikan intervensi sehingga dapat mengatasi krisis terkait anggota keluarga yang menjajaki usia lanjut. Bina Keluarga Lansia (BKL) banyak memberikan manfaat terutama dalam membangun kepercayaan dan silaturahmi serta meningkatkan sistem organisasi yang baik, akan tetapi masih memerlukan intervensi untuk meningkatkan aspek komunikasi dalam keluarga dan dalam komunitas yang dalam hal ini kelompok kegiatan BKL

Berdasarkan hasil dari observasi awal di lapangan ditemukan bahwa masih banyak sebagian masyarakat yang belum menyadari fungsi dan kegunaan dari BKL di lingkungannya. Padahal pengurus BKL beserta Posyandu sudah mensosialisasikan program dari BKL akan tetapi belum mendapat respon yang baik dari masyarakat karena masyarakat belum memahami fungsi dari BKL tersebut. Beberapa pengurus yang ditetapkan oleh Kelurahan sendiri, kader posyandu kuantitasnya kurang sehingga fungsi BKL belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Kota Palembang.

Kebijakan Bina Keluarga Lansia ini sangat penting dan menarik untuk dievaluasi karena kegiatan Bina Keluarga Lansia belum mencapai upaya menilai eksplorasi pelaksanaan berjalannya Bina Keluarga Lansia yang memiliki aktivitas bervariasi. Oleh karena itu, perlu evaluasi kebijakan dari program ini agar dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dalam rangka pengembangan, kelanjutan, program tersebut, selain itu dengan evaluasi kebijakan ini dapat diketahui sejauhmana kebijakan Bina Keluarga Lansia ini telah memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kualitas hidup bagi lansia. Oleh karena itu dari latar belakang penelitian tersebut peneliti mengambil judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu bagaimana hasil evaluasi kebijakan Bina Keluarga Lansia di Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai hasil evaluasi kebijakan Bina Keluarga Lansia di Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai evaluasi kebijakan Bina Keluarga Lansia di kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pengambilan kebijakan agar dapat menciptakan kebijakan yang mampu menjawab permasalahan dalam masyarakat dan memberikan informasi bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Bina Keluarga Lansia di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (edisi revisi)* (6th ed.). alfabeta bandung.
- Astuti, E. Z. L., & Winarni, T. (2018). Mendorong Partisipasi Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam Mewujudkan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh di Desa Sumpersari, Moyudan, Sleman. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 3(2), 129–140. <https://doi.org/10.22146/jpkm.29719>
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. UNIVERSITAS DIPONEGORO Press.
- Badjuri, A. dan T. Y. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Badudu, J. ., & Zain, S. M. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- BKKBN. (n.d.). *GoLantang - Lansia Tangguh*. Retrieved April 25, 2021, from https://golantang.bkkbn.go.id/kategori/kegiatan_lansia
- BPS. (2021). *Badan Pusat Statistik*. <https://palembangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/13>
- Brown, J., Bowling, A., & Flynn, T. (2004). *Models of Quality of Life: A Taxonomy, Overview and Systematic Review of the Literature*.
- Bungin, M. B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Hesti Nurmaslina, 1201413046. (2017). *PERAN KADER BINA KELUARGA LANSIA AGRESIF DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP LANSIA DI DESA BANJARMULYA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG*.
- Ika Nur Rohmah, A., & Bariyah, K. (n.d.). KUALITAS HIDUP LANJUT USIA Quality of Life Elderly. *Juli, 2012*, 120–132.
- Imanda, R. N. (2016). Strategi Peningkatan Quality of Urban Life (QoUL) dengan Pertimbangan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kota Tempat Tinggal Raisa Nur Imanda. *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI*.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Indonesia, P. (1999). Undang-Undang No 13 Tahun 1998. *Mensesneg, September*, 1–2.
- Indrayani, & Ronoatmojo, S. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup lansia di Desa Cipasung Kabupaten Kuningan Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(1), 69–78. <https://doi.org/10.22435/kespro.v9i1.892.69-78>
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Fisip UI Press.
- Junadi. (2005). Penyuluhan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam mewujudkan keluarga lansia tangguh di kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro. *Ilmiah Administrasi Negara*, 1–6.
- Kameriah, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (STUDI PEMBINAAN KESEHATAN FISIK BAGI LANSIA) DI YAYASAN AL KAUTSAR KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH*.
- Kamila, N. (2018). *Pengembangan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam mewujudkan lansia sehat di Desa Besuki*.
- Kartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju.
- Miles, M. B., Hubberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.

- Nugroho, R. (2018). public policy. In Y. Masda (Ed.), *PT gramedia jakarta* (6th ed.). Pendidikan, D., & RI, K. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Perdamaian, T. K., Manus, W. C., Periska, S. D., & Steffiasih, N. N. P. A. (2020). The Impact of Bina Keluarga Lansia Program on the Quality of Life of Elderly in Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 324–330. <https://doi.org/10.15294/kemas.v15i3.19104>
- Puspitasari, N., Suroto, & Widjanarko, B. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Senam Lansia Di Posyandu Kelurahan Sendangmulyo, Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(5), 1032–1041.
- Putri, M. (2018). Determinant Factors to Liveliness of Elderly in participating Elderly Integrated Health Post. *Jurnal Promkes*, 6(2), 213–225.
- RI, B. (2019). *Peraturan BKKBN RI NO 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KELOMPOK KEGIATAN BKL*.
- Ronoatmodjo, S., Tinggi Ilmu Kesehatan, S., Garawangi, K., & Barat, J. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP LANSIA DI DESA CIPASUNG KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(1), 69–78. <https://doi.org/10.22435/kespro.v9i1.892.69-78>
- Sari, D. M. P., Lestari, C. Y. D., Putra, E. C., & Nashori, F. (2018). KUALITAS HIDUP LANSIA DITINJAU DARI SABAR DAN DUKUNGAN SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.22219/jipt.v6i2.5341>
- Seftiani, S., & Vibriyanti, D. (2020). PENYELENGGARAAN PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DI WILAYAH PERKOTAAN: POTRET PERMASALAHAN KLASIK. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 59. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.533>
- Sormin, E., Napitupulu, R., Andrianawati, N. S., Gunawan, R., Ernawati, R., & Wigunawati, E. (2019). PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DOSEN DAN MAHASISWA DI WILAYAH JAKARTA TIMUR. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 198–207. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1289>
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sulandari, S., Wijayanti, M., & Sari, R. D. P. (n.d.). Keterlibatan Lansia dalam pengajian: manfaat spritual, sosial, dan psikologis. *Ilmiah Psikologi*, 103.
- Suyanto, F. D. (2017). PEMBERDAYAAN LANSIA MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF OLEH BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MUGI WARAS DI KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 207. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-10>
- Wahyuni, I. D., Ainy, A., Rahmiwati, A., Kesehatan, P. P., Sosial, P., Palembang, K., Fakultas, S. P., Masyarakat, K., & Sriwijaya, U. (n.d.). ANALISIS PARTISIPASI LANSIA DALAM KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEKAR JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU ANALYSIS OF ELDERLY PARTICIPATION IN HEALTH DEVELOPMENT ACTIVITIES AT THE WORKING AREA OF PUSKESMAS SEKAR JAYA OGAN KOMERING ULU REGENCY.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service (CAPS).